

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Institusi Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Pedesaan

(Kasus Implementasi Program Pembangunan Sosial Masyarakat Berbasis Gampoeng oleh BRR di Desa Kuta Glumpang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)

Suadi

FISIP Universitas Maalikussaleh Lhokseumawe

Abstract: The objective of research is to describe community empowerment in recovering poverty based on local institution which is different from others in rehabilitation and reconstruction Aceh post Tsunami. This research is focused on implementation program and the result of outreach program. The research has done by used the qualitative-descriptive approach. The data was collected by observation, interview and documentation. Then these data would be analyzed by using interactive analysis model. The result of the research is BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) although has placed the facilitator in order to work live-in within two empowerment programs (Revolving Fund and Based Asset Economic Development) but it was not successful in reducing the village poverty. It meant the society has not developed after getting funds which given to them, the revolved fund is not returned in according to the agreement. The society still has mentally consumptive which was higher then productive mental. The revolved fund was used only for the self consumption. Meanwhile the Based Asset Economic Development, the community request from Micro Finance Institution to distribute for concerned community after the facilitator no more incharged in the village.

Keywords: Empowerment Strategy, Society, poverty, village.

Kemiskinan, hingga saat ini masih menjadi *issu* global, tidak saja menjadi masalah pokok di Negara Dunia Ketiga, tetapi ia juga (masih) menjadi persoalan di Negara Maju. Aceh yang mengalami konflik berkepanjangan dan musibah gempa bumi dan tsunami yang dahsyat, kemiskinan merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Sehingga Aceh mendapat prediket sebagai daerah termiskin di Indonesia, menduduki peringkat ke-4 provinsi paling miskin. Salah satu kabupatennya yang mengalami konflik dan musibah gempa bumi dan tsunami adalah Kabupaten Aceh Utara.

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan merupakan

daerah yang tingkat kerusakannya menengah jika dibandingkan dengan daerah-daerah kabupaten/kota lainnya. Untuk memperlancar proses rehabilitasi dan menjalankan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan, maka pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias. BRR bertugas untuk membantu percepatan pembangunan kembali wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang rusak akibat tsunami. Dengan dibentuknya BRR, pemerintah berharap proses pembangunan (fisik dan non fisik) dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Salah satu agenda penting Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dikembangkan oleh BRR adalah mengembangkan kehidupan baru masyarakat dengan mengedepankan penguatan struktur sosial masyarakat agar dapat dikembangkan menjadi model pembangunan yang lebih baik bagi Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Sejak tahun 2006 - 2009, salah satu program utama

Alamat Korespondensi:

Suadi, FISIP Universitas Maalikussaleh Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

sektor sosial adalah pembangunan sosial masyarakat yang diarahkan untuk membangun kembali komunitas di wilayah permukiman agar kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Program Pembangunan Sosial Masyarakat berbasis Gampong dilaksanakan dalam dua tahap (dua tahun anggaran) dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat. Salah satu bentuk program konkrit adalah pemberian Bantuan Dana Bergulir Produktif bagi masyarakat rentan yang telah mempunyai usaha ekonomi dan atau berpotensi mengembangkan usaha ekonomi ke-luarganya. Pembangunan sosial masyarakat berbasis gampong/kawasan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan modal sosial masyarakat sebagai modal utama pembangunan ekonomi, sementara modal ekonomi (dana) bergulir yang diberikan kepada masyarakat secara individu/kelompok dan Dana Pengembangan Ekonomi Gampong Berbasis Aset adalah pendukung aktivitas pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Dana bergulir yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagaimana tersebut di atas berjumlah Rp. 2.000.000,00 /individu. Sementara dana pengembangan ekonomi gampong berjumlah Rp. 75.000.000,00 per desa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Pembangunan Sosial Masyarakat Berbasis Gampong yang mengedepankan strategi pemberdayaan berbasis institusi lokal merupakan salah satu alternatif penanganan kemiskinan pedesaan. Penanganan seperti itu merupakan pengalaman baru khususnya di Aceh. Sebelumnya pasca konflik dan tsunami bentuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak terutama NGO adalah berbentuk bantuan tunai baik dalam bentuk logistik maupun modal usaha, yang penggunaan dan pengelolaannya ditentukan oleh donatur. Untuk itu menarik untuk dilakukan penelitian ter-

hadap Program Pembangunan Sosial Masyarakat Berbasis Gampong guna mendapatkan informasi secara empirik, yang kemudian dianalisis secara ilmiah dan sistematis. Sehingga dapat menjadi sebuah konsepsi dan strategi pemberdayaan masyarakat yang baik. Adapun rumusan dan focus masalah penelitian adalah bagaimana implementasi Program Pembangunan Sosial Berbasis Gampong (Kawasan) dan bagaimana capaian hasil program tersebut.

METODE

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata implementasi Program Pembangunan Sosial Berbasis Gampong (Kawasan) secara sistematis dan factual, serta bagaimana pencapaian hasil program. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dan evaluatif. Menurut Danim (2002: 61), pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Di mana analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Yin dalam Suprayogo & Tobroni, 2001: 192). Penelitian ini dilakukan di Desa Kuta Glumpang Kecamatan Samudera Pasai Kabupaten Aceh Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Desa Kuta Glumpang

Kuta Glumpang adalah salah satu desa yang mendapat perhatian BRR dalam pelaksanaan pembangunan pasca tsunami. Jarak Kuta Glumpang dengan ibu kota Kecamatan Samudra, Geudong lebih kurang 3 Km. Adapun batas-batas gampong, sebelah timur dengan Gampong Meucat, sebelah ba-

rat dengan Gampong Kuta Krueng, sebelah selatan dengan Gampong Meucat dan sebelah utara dengan Selat Malaka. Sedangkan luas wilayah Gampong Kuta Glumpang kira-kira 900 x 1450 m². Gampung Kuta Glumpang didiami oleh 662 jiwa (309 laki-laki dan 313 perempuan) yang terbagi kepada 155 Kepala Keluarga (KK). Potensi Gampong Kuta Glumpang terdiri dari sawah 5 ha, tambak 35 ha, perkebunan 22 ha dan lahan tidur 8 ha yang merupakan potensi gampong yang perlu dikembangkan dan diolah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Gampong kuta Glumpang. Mata pencaharian penduduk Gampong kuta Glumpang terdiri dari. Nelayan, petani tambak, peternak, petani sawah, petani kebun, dagang, Pegawai negeri Sipil (PNS), jasa RBT, penjahit dan buruh. Dengan beraneka ragam tersebut tentunya masyarakat Gampong kuta Glumpang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, dari hasil kalkulasi kasar rata-rata masyarakat Gampong Kuta Glumpang memiliki pendapatan rata-rata Rp. 500.000,- perbulan (LKSM, 2007).

Dilihat dari pendapatan rata-rata di atas, kemiskinan masyarakat Kuta Glumpang dapat dimaknai kemiskinan pendapatan (*income*) individu, kelompok, komunitas, karena pendapatan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan (Zikrullah, 2000: 11). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4). Jumlah pendapatan masyarakat sebagaimana tersebut di atas tentu tidak dapat memenuhi kalori 2100 kilo kalori perhari. Kondisi ini juga dipertegas oleh David Cox (2004: 9) bahwa seseorang dapat dikategorikan miskin ji-

ka tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Faktor terjadi kemiskinan pada masyarakat Kuta Glumpang sangat kompleks, yaitu akibat globalisasi (bagian dari wilayah Dunia Ketiga), proses pembangunan yang kurang berpihak kepada mereka, konflik berkepanjangan dan bencana alam (tsunami) yang menimpa wilayah tersebut. Kondisi seperti ini oleh David Cox (2004: 1-6) kemiskinan dibagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu; a) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, c) dan Kemiskinan subsistensi (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), d) Kemiskinan konsekuensial. Max Neef dalam Zikrullah (2000: 11) mengatakan kemiskinan subsistensi adalah kemiskinan penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.

Implementasi Program Pembangunan Sosial Berbasis Gampoeng

Untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas diperlukan konsep dan paradigma baru pembangunan, yaitu permbangunan yang memiliki nilai pemberdayaan. Pemberdayaan adalah satu konsep yang memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*kapabilitas*) yang melingkup sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Berkaitan dengan ini, BRR telah merancang satu Program Pembangunan Sosial Berbasis Gampoeng, yang merupakan bagian dari strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BRR melalui Satker Agama, Sosial dan Budaya, yang bertujuan mempersiapkan masyarakat untuk mandiri dan tidak ketergantungan secara berkelanjutan dengan para pihak donatur termasuk BRR,

yang selama beberapa tahun ini membantu masyarakat secara cuma-cuma dan para donatur tersebut (terutama NGO Asing) bahkan BRR akan berakhir di Aceh pada tahun 2009 (wawancara dengan koordinator program, 9 Oktober 2007).

Program ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dikatakan (Parsons, et al., 1994: 106), pemberayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya (Ife, 1995: 56) mengatakan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Dalam pelaksanaan program tersebut BRR-Satker Agama, Sosial, dan Budaya menyeleksi dan merekrut personil-personil yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Personil yang direkrut merupakan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang telah mempresentasikan konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat di depan anggota Satker dan Tim Seleksi yang dibentuk oleh Satker tersebut. Untuk setiap desa sasaran ditempatkan dua personil sebagai fasilitator.

Setelah fasilitator direkrut, BRR melakukan Pengembangan Kapasitas fasilitator melalui *coaching*. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali pada awal pelaksanaan program pada bulan Agustus 2007. Yang pertama dilaksanakan di Banda Aceh. *Coaching* ini tidak diikuti oleh semua fasilitator desa, melainkan diwakili oleh satu orang fasilitator dari setiap desa. Yang kedua dilaksanakan

di Bireuen Aceh Jempa yang juga diikuti oleh fasilitator desa secara representatif. Diutamakan bagi fasilitator yang belum mengikuti *coaching* yang pertama. Tetapi kegiatan ini tidak lagi dibatasi bagi fasilitator saja, melainkan sudah diikutsertakan ketua LKM dari setiap desa (wawancara dengan koordinator Program).

Dalam melaksanakan pendampingan program sebagaimana dimaksud di atas, fasilitator yang ditugaskan di desa menggunakan pendekatan partisipatif-Live in. Dengan harapan fasilitator tersebut benar-benar menjadi mediator dan penggerak masyarakat miskin. Fasilitator dalam menjalankan tugasnya diberi fasilitas yang memadai, tempat tinggal, biaya konsumsi dan honor. (wawancara dengan anggota Satker, 1 September 2007). Sementara metode pelaksanaannya adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA), penilaian/pengkajian terhadap keadaan atau kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta mengkaji permasalahan dan pemecahannya dengan melibatkan warga dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan (Wawancara dengan fasilitator, 25 September 2007). Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang diperoleh pada tanggal 5 Oktober, di mana fasilitator, anggota LKM, dan tokoh masyarakat bermusyawarah mengenai potensi daerah yang strategis untuk dikembangkan.

Fasilitator di lapangan selain menggerakkan masyarakat juga mendampingi anggota Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sudah terbentuk pada tahun 2006, yang memiliki tugas utama mengelola dana bergulir produktif yang telah disalurkan oleh BRR. Anggota LKM tersebut dipilih melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh fasilitator. Adapun tugas-tugas fasilitator dalam pendampingan Program Pembangunan Sosial Berbasis Gampong adalah sebagai berikut.

Assesment

Assesment merupakan suatu kegiatan pengkajian dan penilaian tentang keadaan desa yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik permasalahan ekonomi maupun sosial. Assesment ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dalam assesment, tenaga pendamping (fasilitator) desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memperkenalkan program kepada masyarakat sasaran melalui sebuah forum yang dibentuk bersama. Dalam tahapan ini fasilitator meyakinkan masyarakat bahwa dengan kehadiran program dapat memberi harapan perubahan sosial-masyarakat (*social change*) kearah yang lebih baik.
- Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Setelah fasilitator memperkenalkan program pendampingan, fasilitator melakukan indentifikasi kebutuhan komunitas beserta dengan potensinya dengan mengikutsertakan masyarakat. Indentifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*Focus Group Discusion*) dan survei serta observasi.
- Melakukan konsultasi dengan pemerintahan gampong. Pada langkah ini, fasilitator berkonsultasi dengan lembaga-lembaga pemerintah gampong tentang kebutuhan dan potensi gampong yang telah diinventarisir pada langkah sebelumnya untuk ditentukan bentuk program yang akan dijalankan.
- Membangun kesepakatan warga. Bentuk program yang telah dikonsultasikan dengan lembaga-lembaga pemerintah gampong selanjutnya dimusyawarahkan pada tingkat masyarakat.

Memfasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan

Dalam keggiatan ini langkah-langkah yang dilakukan fasilitator meliputi:

- Membantu lembaga keuangan mikro yang sudah terbentuk untuk mengelola bantuan dana dari BRR yang sudah didistribusikan kepada komunitas (*beneficiaries*). Pada tahapan ini fasilitator terlibat aktif dengan anggota LKM mencari solusi percepatan pengembalian dana dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Di samping itu fasilitator selalu memotivasi masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan diri sendiri.
- Membantu serta memfasilitasi anggota LKM dan masyarakat untuk mengidentifikasi aset usaha bersama milik gampong yang layak dikembangkan sebagai aset ekonomi gampong. Kemudian memfasilitasi membuat proposal untuk diajukan kepada BRR melalui Satker Agama, Sosial dan Budaya, Wilayah II Kota Lhokseumawe.
- Memfasilitasi anggota LKM dan masyarakat untuk merealisasikan program pengembangan aset ekonomi gampong yang telah disetujui oleh BRR. Disamping itu fasilitator juga memfasilitasi anggota LKM membuat laporan narasi dan laporan realisasi penggunaan anggaran dari program pengembangan aset ekonomi gampong.

Pengembangan Kapasitas Anggota LKM

Keberadaan anggota LKM merupakan hal yang penting dalam program ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas anggota LKM guna terjaminnya pengembangan LKM dan Aset Ekonomi Gampoeng. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memberi pelatihan. Pelatihan ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan anggota LKM dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Ruang lingkup pelatihan pengembangan kapasitas adalah manajemen finansial, manajemen organisasi, metode asesment dan strategi pendampingan, serta tata cara berkomunikasi secara efektif. Namun yang dilakukan secara formal adalah hanya manajemen keuangan dan kearsipan, sementara yang lainnya dilakukan secara informal oleh fasilitator di masing-masing desa.

Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat, yaitu lembaga LEMSA bekerja sama dengan BRR – Satker Agama, Sosial, dan Budaya Wilayah II Kota Lhokseumawe. Pelatihan ini diikuti oleh anggota LKM gampong di wilayah kecamatan Samudera Pasai Aceh Utara, yang berlangsung selama 2 (dua) hari, yaitu; pada tanggal 17 – 18 November 2007 di Gedung IPHI Kota Lhokseumawe (BRR-Satker Agama, Sosial dan Budaya Wilayah II, 2007).

Dilihat dari strategi yang diterapkan oleh BRR dalam pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan yang banyak ditulis oleh para pakar. Di mana BRR telah melakukan pemberdayaan secara terarah (masyarakat miskin pesisir/termarjinal, bekas daerah konflik dan tsunami), mengikutsertakan masyarakat sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok (dilakukan secara musyawarah dan bersama). Sebagaimana dikatakan Ginandjar Karta Sasmita (1997: 11) pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut, yaitu; Pertama, upaya pemberdayaan harus terarah (*targeted*). Program ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, programnya mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Selain itu berkaitan dengan program tersebut BRR telah menyediakan fasilitator yang bertugas melakukan pemberdayaan yang tepat, yaitu pemberdayaan yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable* (Chamber, 1995 dalam Solihin, 2007: 5). Hal ini terlihat dengan jelas dari kegiatan fasilitator di lapangan sebagaimana yang diuraikan di atas. Selanjutnya fasilitator yang rekrut oleh BRR pun telah menciptakan iklim demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Segala keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program diambil melalui musyawarah, sementara fasilitator hanya memfasilitasi pertemuan. Kemudian Pembentukan dan penguatan kelompok atau organisasi secara modern pun sudah dilakukan oleh fasilitator, terutama pembentukan LKM yang memiliki kekuatan hukum, terdaftar pada notaris, dan pengurus LKM memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam mengelola LKM. Yang terkedala dalam hal ini cuma honor yang sangat minim dan terbatas. Pembangunan jaringan kerjasama antar individu, lembaga/kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga ekonomi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Solihin (2007: 8-11) mengatakan konsep pemberdayaan masyarakat miskin mencakup; a) *community development*, yang meliputi kegiatan pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan (segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan program selalu dimusya-

warahkan dan keputusan berada di tangan masyarakat), b) *promoting opportunity*. Terkait dengan ini BRR juga melaksanakan Pembangunan Prasarana dan sarana fisik, seperti jalan dan pendidikan, dan c) *enhancing social security*. Dalam hal ini BRR melalui fasilitator dan masyarakat telah membentuk LKM yang menyalurkan bantuan modal usaha kepada masyarakat tanpa anggunan. Sehingga tidak perlu legalitas kepada properti masyarakat miskin yang digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro.

Satu hal yang sangat berbeda dengan program lainnya dalam pemberdayaan yang dilakukan BRR melalui Satker Agama, Sosial dan Budaya adalah menempatkan fasilitator di desa dengan cara live-in. Artinya fasilitator selama bertugas selalu berada bersama masyarakat. Kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat terdampangi secara terus-menerus dan program terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Pencapaian Hasil Program Pembangunan Sosial Berbasis Gampong Bantuan Dana Bergulir Produktif

Dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat tidak mencapai hasil sesuai dengan harapan. Dana tersebut dikembalikan pada awalnya saja, sementara bulan selanjutnya terjadi penundaan. Hal ini dilakukan oleh mayoritas penerima manfaat dana bergulir tersebut. Kemacetan pengembalian dana tersebut mencapai 80% (laporan bulanan LKM, September 2007). Ini terjadi karena dana yang diberikan kepada masyarakat kurang tepat sasaran. Artinya dana diberikan kepada orang miskin (rentan) tetapi kurang punya potensi untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Di samping itu juga kebanyakan masyarakat menuntut dana tersebut dibagi sama rata. Sehingga orang yang sudah menerima dana tersebut wajib membagikannya kepada orang lain (wawancara

dengan seorang warga masyarakat, 15 Oktober 2007). Menurut ketua LKM Desa Kuta Glumpang (wawancara, 11 Nopember 2007), dana tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada untuk usaha, bahkan jika diperhatikan tidak ada masyarakat yang mengelola usaha dengan dana bergulir tersebut. Kondisi seperti sangat menyulitkan kami pihak LKM untuk menarik kembali dana bergulir tersebut.

Hal serupa diungkapkan oleh seorang fasilitator (wawancara, 23 Nopember 2007), Kesadaran dan kemamuan masyarakat masih sangat minim untuk mengembalikan dana bergulir yang telah diterima pada Program Bantuan Sosial Produktif tahun 2006, karena adanya anggapan masyarakat terutama penerima dana bergulir bahwa dana tersebut adalah dana hibbah, sama halnya seperti dana-dana yang diberikan oleh NGO atau donatur lain pada saat pertama pasca tsunami. Disamping itu sebagian penerima dana bergulir tersebut tidak memiliki potensi produksi dalam usaha, dan juga karena kurangnya sanksi sosial dari masyarakat terhadap penerima dana bergulir yang tidak mengembalikannya.

Selanjutnya, dari hasil wawancara mendalam dengan pengurus LKM (Ketua dan Sekretaris) terkait dengan tingginya tingkat kemacetan pengembalian dana bergulir tidak terlepas juga dari faktor internal pengurus LKM. Dari 5 orang jumlah anggota LKM hanya 2 orang yang benar aktif. Hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing pengurus LKM yang mengakibatkan kurangnya waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk memajukan LKM. Alasan mereka kurang terfokus pada LKM adalah honor yang diberikan sangat minim, tidak mencukupi kebutuhan pribadi apalagi kebutuhan keluarga.

Bantuan Dana Pengembangan Ekonomi Gampoeng Berbasis Aset

Dana ini diberikan oleh BRR kepada masyarakat melalui LKM. Artinya pengelolaan dana tersebut berbeda dengan dana bergulir. Dana ini dikelola oleh LKM dengan cara mengembangkan usaha strategis berlandaskan potensi gampoeng. Kemudian jika memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, sebagiannya dapat dipergunakan untuk operasional LKM secara berkelanjutan. Sebagian lainnya dipergunakan untuk membantu masyarakat secara bergulir dalam pengembangan usahanya.

Di Desa Kuta Glumpang, oleh LKM dana Pengembangan Ekonomi Gampoeng Berbasis Aset dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan mujair. Selama fasilitator bertugas di lapangan masyarakat sangat mendukung program tersebut. Hal ini dimaknai dari tidak adanya konflik antar masyarakat dan LKM (observasi, Oktober-Nopember 2007), sehingga anggota pengurus LKM tidak ada kendala dalam mengelola usaha tersebut. Mulai dari persiapan proposal kepada BRR dan pelaksanaan usaha (pelepasan bibit ikan ke dalam lokasi) berjalan lancar. Namun sekitar satu minggu setelah fasilitator meninggalkan desa tersebut karena masa tugas sudah berakhir (30 Desember 2007), muncul sekelompok orang yang memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya kepada pengurus LKM dalam mengelola aset gampoeng yang sudah berjalan satu bulan. Sehingga masyarakat menjala ikan-ikan yang ada dalam tambak aset ekonomi gampoeng. Bahkan konflik pun muncul antara masyarakat dan pengurus LKM, karena pihak LKM tidak mau membagi rata kepada masyarakat dana bantuan tersebut (wawancara mendalam dengan anggota LKM 15 Januari 2008).

Menurut ketua LKM (wawancara, 15 Januari 2008) masyarakat tidak setuju dana aset gampoeng dikelola oleh LKM. Mereka

setuju diawal saja agar uang diberikan oleh BRR. Setelah fasilitator yang ditugaskan oleh BRR masyarakat meminta dana dan aset tersebut dibagi kepada masyarakat secara keseluruhan dan merata. Fenomena ini sebenarnya bukan yang pertama di desa ini. Hampir setiap bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dituntut untuk dibagi sama bagi semua anggota masyarakat. Dengan kata lain banyak orang menjadi (mengaku) miskin ketika datang program bantuan untuk orang miskin.

Fenomena ini jika dilihat secara teliti dan jeli dapat dipahami bahwa faktor utama kegagalan program tersebut karena kurangnya rasa kepercayaan antar sesama masyarakat dan nilai gotong-royong serta tolong-menolong sudah menipis. Masyarakat sudah lebih merasa senang menerima daripada memberi. Rasa malu pun sudah menipis, sehingga berbuat 'jahat' seperti meminta sesuatu yang bukan haknya pun berani dengan memaksa secara terang-terangan. Artinya ketika program ini bergulir dan dana sudah masuk ke rekening LKM ada kelompok/oknum yang berani meminta *fee* (hak) dari dana tersebut, padahal mereka tidak berhak untuk memiliki dana tersebut.

Kegagalan atau kurang berhasilnya dua program pengembangan ekonomi masyarakat yang disebutkan di atas, nampak lebih diakibatkan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat sudah terbiasa dengan bantuan tunai secara cuma-cuma yang diberikan oleh banyak NGO asing pada awal pasca tsunami. Kebanyakan NGO asing memberikan bantuan ekonomi tanpa dibaringi dengan pemberdayaan pada awal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami dan dana yang diberikan diperuntukkan untuk konsumsi oleh masyarakat. Hal ini telah menyebabkan masyarakat bermental menerima tanpa memberdayakan diri untuk mandiri dan tidak bergantung terus menerus pada bantuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kurang berhasilnya dua program pemberdayaan tersebut dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan, walaupun BRR telah menempatkan fasilitator secara live-in, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat tidak mencapai hasil yang baik. Artinya masyarakat belum mengalami perubahan dalam menyikapi bantuan yang diberikan kepada mereka. Masyarakat masih memiliki mental konsumtif yang lebih tinggi daripada mental produktif atau jiwa kewirausahaan. Sehingga belum terlihat terjadi peningkatan ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh implementasi dua program tersebut di atas. Bahkan program pengembangan ekonomi berbasis asset telah berdampak negative, dimana masyarakat berkonflik dengan pengurus LKM, sehingga mereka mengundurkan diri dan kepengurusan.

Kurang berhasilnya program tersebut dominan disebabkan oleh masyarakat sendiri. Terutama yang berkaitan dengan bantuan dana bergulir produktif, di mana dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin (rentan), masyarakat umum meminta dibagi secara merata tanpa memperhatikan prioritas sasaran program, yaitu orang miskin. Pembagian dengan skala prioritas hanya dilakukan secara administrasi ketika proses pencairan uang di depan pengurus LKM dan fasilitator desa. Selanjutnya dana tersebut dibagikan secara merata dan digunakan untuk konsumsi keperluan sehari-hari. Sementara untuk Dana Pengembangan Ekonomi Gampong Berbasis Asset masyarakat pun meminta kepada LKM untuk dibagikan kepada masyarakat. Persetujuan mereka terhadap program hanya untuk menyakinkan Fasilitator dan BRR, dana tersebut akan dipergunakan sesuai prosedur. Setelah fasilitator tidak bertugas lagi di lapangan

asset yang sedang dijalankan pun (budi daya ikan mujair) diambil oleh sekelompok masyarakat dan dibagi-bagi kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan kepada para pihak yang peduli kepada masyarakat miskin sebagai berikut:

- Ke depan semua donatur yang ingin membantu masyarakat miskin dalam bentuk bantuan dana bergulir agar tidak memberikan uang secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk barang yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha mereka.
- Pendampingan oleh fasilitator hendaknya dilakukan secara berkelanjutan terhadap LKM. Paling tidak sampai pada pemerolehan hasil usaha perdana, sehingga masyarakat menyadari dan percaya bahwa dana pengembangan ekonomi gampong juga akan bermanfaat bagi masyarakat, dan bukan menguntungkan pengurus LKM semata.

DAFTAR RUJUKAN

- BRR-Satker Agama, Sosial dan Budaya Wilayah II. 2007. Laporan Akhir Program Pembangunan Sosial Masyarakat Kecamatan Samudera Aceh Utara.
- BPS Kerjasama dengan Depsos R.I. 2003. *Penduduk fakir miskin Indonesia 2002*, Jakarta.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- David Cox. 2004. *Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region*, makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia,, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial

- Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, Australia, Longman Pty Ltd.
- Ginandjar Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, [http:// www.ginandjar.com](http://www.ginandjar.com).
- LKSM Kuta Glumpang. 2007. *Proposal Pengembangan Ekonomi Berbasis Aset*, Geudong Aceh Utara.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*, California: Brooks/Cole
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*. Second edition London: MacMiillan Press Ltd.
- Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Sholihin, Dadang. 2007. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal*, [http:// www. Dadangsolihin.com](http://www.Dadangsolihin.com).
- Suprayogo & Tobroni Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zikrullah, Y., Adam. 2000. *Struktur Ekonomi dan Peengembangan Kemiskinan*, Media Paartisipatif – P2KP, No. 07 Edisi Oktober.